

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- A Ilmar . 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Agusman Dumoli Damos. 2007, *Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departmen Luar Negeri*, Jakarta, hlm 9.
- Bayu Ario. 2013, *Keuntungan Indonesia Dengan Adanya Kerjasama AK-FTA (Asean-Korea Free Trade Area)*, Jember: Universitas Jember.
- Chaisse Gugler.2010.*Competitiveness of the ASEAN Countries Corporate and Regulatory Drivers*, Edward Elgar Publishing.
- Chalid Pheni. 2005, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Jakarta: Mitra.
- Gemma, Estrada, Dongyun.2012.*ASEAN Economic Bulletin. The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA): A Qualitative and Quantitative Analysis*.
- Harjono K. Dhaniswara.2000, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huseini. 2004, *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*, Jakarta: Gramedia.
- I Manan Bagir.1994, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II.Makalah dalam Lokakarya Pancasila*, Bandung: Unpad.
- Ilmar Aminuddin.2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Jatmika Sidik. 2001, *Otonomi Daerah, Perspekti f Hubungan Intenasional*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Nicolas Meisel, *Governance Culture and Development: A Different Perspective on Corporate Governance*, Organisation for Economic Coperation and Development.p.41
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 *Tentang Pelayanan Perizinan dan Investasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri*.

Purwanto Widi. 2006, *Untukmu Purbalingga Dalam Biografi Bupati Purbalingga*, Jakarta:

Cahaya Tirta Buana.

Putra Fadilla, 1999, *Prospek otonomi Daerah*, Semarang : UNDIP.

Said. 2008, *Arah Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia.

Siregar Mahmul, 2008, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*, Medan:Universitas Sumatera.

Syafiie Kencana Inu. 1999, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi.Jakarta: Rineka Cipta.

Syahroni Barkah. 2005, *Analisis Jabatan, Implementasi dan Prospek Dalam Era Otonomi Daerah di Llingkungan Pemerintah Provinsi DIY*, Makalah dalam Bimtek Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi DIY, hlm. 4.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*.

Untung Budi Hendrik.2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawan, *Rekrutment tenaga kerja PT. Royal korindah*, Purbalingga.

Wiji. 12 Juli 2017, *Proses masuknya Investor asing Korea Selatan di Kabupaten Purbalingga*, Kantor Penanaman Modal Asing Kabupaten Purbalingga.

JURNAL

Dallas. 2012, *Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and Indonesia*, *Journal of East Asian Studies*, Vol. 12, No. 1

Netzer Antonio & Campbell Dennis. 2008, *Joint Venture International*, volume editor, Austria.

Gilpin Robert. 2001. *State and The Multinationals. Global Political Economy Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton University Press. pp. 278-304

Yang Yun Sung, 2005, *Empat puluh tahun 1996-2005 kerjasama indonesia – korea selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 298.

Warta ekonomi. 1994 *Berita harian ekonomi dan bisnis, Asteng ancem Korsel*, vol. 6, Obor sarana urama. hal.21-25



SUMBER LAPORAN DAN TERBITAN LEMBAGA PEMERINTAH

Bapelitbangda, Kebijakan Pro Investasi Kabupaten Purbalingga (daring), <<https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2013/09/RPJMD-2010-2015.pdf>>, diakses 26 oktober 2017

Even. Dinas Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan Rambut Dan Bulu Mata Palsu Kabupaten Purbalingga, 27 Juli 2017.

SUMBER ONLINE

Ibrahim, merdeka.com jawatengah, Telah lakukan hal ini, Bupati Purbalingga klaim kurangi pengangguran, 06 Maret 2017, (daring), <<https://jateng.merdeka.com/industri/telah-lakukan-hal-ini-bupati-purbalingga-klaim-kurangi-pengangguran-1703067.html>>, diakses 23 April 2017.

1Banyumas, BanyumasNews.com, ““Bang Toyib”, Penyebab Tertinggi Perceraian di Purbalingga”, 28 Juli 2017, (daring), <<http://banyumasnews.com/96791/bang-toyib-penyebab-tertinggi-perceraian-di-purbalingga/>>, diakses 1 Januari 2018.

GD Kartikasari, GOVERNMENT POLICY ANALYSIS OF PLASMA INDUSTRIAL DISTRICT PURBALINGGA HAIR AND EYELASH FALSE IN THE DISTRICT PURBALINGGA, Universitas Jendarl Soedirman, 2015, (daring), <<https://media.neliti.com/media/publications/105965-ID-none.pdf>>, diakses 12 September2016.

LEMBAGA PEMERINTAH

BAPELTIBANGDA Kabupaten Purbalingga.

BPS Kabupaten Purbalingga.

DIKNAKER Kabupaten Purbalingga.

DINSOSDALDUK KB P3A Kabupaten Purbalingga.

DPMPTSP Kabupaten Purbalingga.